

SKRIPSI



IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAM

OLEH :

NUR ALIMAH Z.

B11113326

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAM

Disusun dan diajukan oleh:

NUR ALIMAH Z.

B111 13 326

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 30 Mei 2017
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 1992022 002

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Alimah Z

NIM : B 111 13 326


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak ditinjau dari Sudut Pandang HAM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, Mei 2017

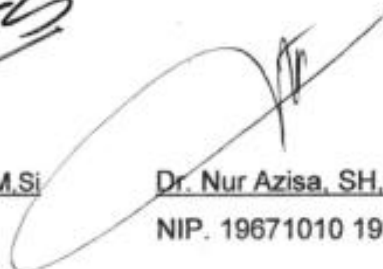
Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, SH., MH., M.Si

NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II



Dr. Nur Azisa, SH, MH.

NIP. 19671010 1992022 002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NUR ALIMAH Z
Nomor Pokok	: B11113326
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2017

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Dr. Ahmad Miru, SH., MH
NIP. 196104071986011003

ABSTRAK

Nur Alimah Z. (B111 13 326), “Diversi terhadap Tindak Pidana oleh Anak ditinjau dari Sudut Pandang Ham” , dibimbing oleh Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si., selaku pembimbing I dan Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama untuk mengetahui implementasi diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ditinjau dari sudut pandang ham, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah(balai pemasyarakatan) dalam implementasi diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Panakukang Makassar dan di Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar dengan metode penelitian dengan cara studi pustaka dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana menjadi suatu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang merujuk kepada Hak Anak untuk dilindungi oleh hukum agar bisa melanjutkan kembali hidupnya. Adapun yang menjadi kendala muncul dari keluarga korban yang tidak ingin memilih penyelesaian perkara dengan cara diversi melalui pendekatan *restorative justice* sehingga pelaksanaan diversi masih kurang efektif. Dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, Balai Pemasyarakatan berperan penting dalam proses perkara anak. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum terkait diversi melalui proses penanganan anak yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pra ajudikasi, ajudikasi, post ajudikasi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga dapat merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Segecap kemampuan telah penulis curahkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Namun demikian, sebagai manusia penulis tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluargaku yang tercinta, yaitu kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda **Almarhum H. M. Zain Beta** dan Ibunda **Hj. Sitti Fatimah** yang telah banyak memberi kasih sayang, dukungan baik moril maupun materil, nasehat, dan doa sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik dan kepada kakak kakakku yang tercinta, **Bayanuddin Zain, S.E., Hamdiana Zain, Nurul Jihad Zain, S.Pd., dan Ahmad Thayyib Zain, S.E** yang telah memberi semangat, dorongan dan motivasi kepada penulis.

Terima kasih pula penulis ucapkan kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.**, selaku pembimbing I yang memberikan saran, bimbingan serta motivasi untuk menulis sebaik mungkin, sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik.
4. **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H** selaku pembimbing II yang meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., H. M. Imran Arief, S.H., M.S.**, dan **Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M** selaku dosen–dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran mulai dari rencana penelitian hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak **Ahmad, S.H., M.H.** selaku Penasehat Akademik yang selama berkuliah telah memberikan wejangan-wejangan yang bermanfaat bagi proses perkuliahan penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
8. Keluarga Besar **Pattola Ponreng**, paman-tante, dan sepupu-sepupu penulis atas motivasi dan bantuannya kepada penulis.
9. Kepada Kapolsek Panakukang dan beserta para jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

10. Kepala Bapas Klas I Makassar dan beserta para jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Kepada Little Pony sebagai Sahabat dan teman seperjuangan : **Anggun S. Kartawijaya, Satria Nurul Suci a.k.a. Ayu, Adriani Amalia Risky a.k.a. Doris, Tantri S. Bachtiar, Kasni Hafid, dan Fitriana Bella a.k.a. Mimi** yang selama ini telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis. Memberikan masukan-masukan kepada penulis dan telah memberikan bantuan, dukungan dan persaudaraan selama kuliah di Fakultas Hukum.
12. Kepada **Ratna Dewi** yang telah membantu sedikit banyak dalam penyusunan skripsi ini, yang telah mendengarkan keluhan-keluhan penulis dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada **Mahyudi Wijaya** yang telah memberikan wejangan-wejangan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada **Andi Hardiyanti** yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
15. Kepada **Muhammad Hajrani Basman** yang telah setia mendengarkan keluhan dan memberikan masukan-masukan kepada penulis.
16. Teman-teman angkatan **ASAS 2013** yang selama ini bersama-sama mengikuti pengkaderan dan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas.

17. Teman-teman KKN Gel. 93 Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa , Kabupaten Bantaeng, **Alam Pratama, Muh. Azwin Sudarmin, Alfiansyah, Adnan, Resky Afrianti M, Nurul Dewinta, Mulyati Mangoting, Wiwie Pratiwi, Liku Arruan, Andi Gaung Lesang, Andriyani Subekti**, yang telah bersama-sama melalui suka dan duka selama di Posko KKN.

18. Keluarga Besar **UKM ALSA LC UNHAS**.

19. Segenap orang-orang yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak sempat dituliskan namanya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya. Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dalam memperkaya khasanah ilmu dan khususnya bagi para penegak hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis

Nur Alimah Z.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tindak Pidana.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
B. Pengertian Anak dan Hak Anak	13
1. Pengertian Anak.....	13
2. Hak Anak.....	18

C. Hak Asasi Manusia	21
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	21
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Anak	24
D. Diversi	26
1. Pengertian Diversi	26
2. Tujuan Diversi	27
3. Syarat Diversi	28
E. Balai Pemasyarakatan.....	29
1. Pengertian Balai Pemasyarakatan	29
2. Tugas,Fungsi dan Kedudukan Balai Pemasyarakatan	30
3. Esensi Pembinaan Terhadap Anak	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis Dan Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Diversi Terhadap Tindak Pidana oleh Anak ditinjau dari Sudut Pandang HAM.....	38
1. Latar Belakang Diversi.....	38
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Diversi	40
3. Pelaksanaan Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	51

4. Kriteria dan Syarat-Syarat dilaksanakannya Diversi.....	53
5. Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia	58
B. Peran Balai Pemasyarakatan dalam Penerapan Diversi pada Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak.....	65
1. Kedudukan Hukum Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana	66
2. Peran Balai Pemasyarakatan dalam Penerapan Diversi.....	66
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi muda, calon pemimpin bangsa dan sumber harapan bagi generasi terdahulu akan meneruskan cita-cita luhur bangsa sehingga perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya mereka akan menggantikan para generasi pendahulunya.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Berbagai isu telah dibahas dalam konvensi hak anak, salah satu yang membutuhkan perhatian khusus adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak dapat dilihat dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan¹ sehingga kewajiban bagi masyarakat untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kepentingan yang terbaik untuk anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial. Anak memerlukan bantuan dari orang lain, mengingat situasi dan kondisi, terutama dalam perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.²

Anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun adanya sifat menyimpang anak. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang mereka. Proses penghukuman yang diberikan lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan jera dan membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru

¹ Mukaddimah Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²*Ibid.*, hal.2.

seringkali membuat anak semakin ahli dalam melakukan tindak kejahatan.³

Permasalahan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai sebuah topik yang tak kunjung selesai, bahkan ada beberapa negara yang pemenuhan kondisi anaknya sangat memprihatinkan. Banyak anak yang menjadi korban kekerasan di keluarganya, mengalami penderitaan akibat peperangan ataupun ikut mengangkat senjata demi membela bangsa dan negaranya. Masyarakat seolah-olah lupa bahwa anak merupakan karunia yang tidak ternilai yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa untuk di sayang, dikasihi, diasuh, dibina, dirawat atau pun di didik oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Dilihat dari sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak membuat mereka menjadi pribadi yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/perkembangan. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak di jaman sekarang, ditambah faktor-faktor penunjang terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan kekerasan di layar kaca hingga berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Ironisnya, proses imitasi / meniru merupakan proses belajar yang paling dominan dalam diri anak.

³ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta, 1995, hal.1.

⁴ *Ibid.*, hal. 1-2

Beranjak dari hal tersebut, diperlukan upaya perlindungan untuk menyelamatkan anak bangsa, salah satunya adalah pendekatan *restorative justice* yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Balai Pemasyarakatan ikut berperan penting dalam pendampingan seorang anak yang behadapan dengan hukum. Pendampingan dilaksanakan sejak anak menjalani proses peradilan sampai anak mendapat putusan pengadilan atau dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra ajudikasi (penyidikan), tahap ajudikasi (pemeriksaan di sidang pengadilan) dan tahap post ajudikasi (pelaksanaan putusan hakim).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis bertujuan untuk meneliti hal tersebut lebih jauh dan mengangkat judul **“Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk memfokuskan penulisan skripsi ini, penulis membatasi pembahasan rumusan masalahnya pada:

1. Bagaimanakah implementasi diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia?
2. Bagaimanakah peran pemerintah (Balai Pemasyarakatan) dalam implementasi diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia.
2. Mengetahui peran pemerintah (Balai Pemasyarakatan) dalam implementasi diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai diversi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ditinjau dari sudut pandang pemenuhan hak asasi manusia dan hak anak.
3. Memberikan literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“ Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”⁵

Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, P.T. Rineka Cipta, 2007, hlm 92.

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁶

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah:

“Tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”

Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah:

“suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”

R.Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa:

“Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkain perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”⁷

Jonkers merumuskan bahwa :

“*strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”⁸

Menurut Simons, tindak pidana adalah:

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-

⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 Hlm 20.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Bagian Pidana I*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, Hlm 72-73.

⁸ Amir Ilyas, *OP.Cit*, hlm 20.

jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁹

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan.¹⁰

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

a. Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia(*actus reus*) terdiri atas:

- 1) (*Commision/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutkan sebagai perbuatan (aktif/positif)
- 2) (*Ommision*) yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutkan perbuatan (pasif/negatif).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat (*Commision/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*omission*) juga dapat diancam pidana, karena *Commision/act* maupun *omission* merupakan perbuatan yang melanggar hukum. *Comission/act*, yang sebagian pakar menyebutkan sebagai

⁹ Tongat, *dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, Cetakan kedua, Malang, Uum Press, 2009, hlm 105

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2011, hlm 48

perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan sengaja melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900”¹¹

Omission, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiadakan atau memberikan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain:

“Barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”¹²

b. Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam Pasal-Pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan:

Ke-1 : bertentangan dengan hukum(objektif);

Ke-2 : bertentangan dengan hak (subektif) orang lain;

¹¹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* , Bogor, Politea, 1995, hlm 249

¹² *Ibid*, hlm 141

Ke-3 : Tanpa hak. ¹³

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut:

“Menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”¹⁴

Melihat uraian definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

1) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, yang dimaksud perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang. Bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.¹⁵

2) Sifat melawan hukum materil (*materiel wedderrchtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung, Freka Aditama, 2010, hlm.2

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm.445

¹⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit* . hlm 53

(hukum tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.¹⁶

Penjatuhan tindak pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu Pasal, salah satunya adalah sifat melawan hukum (*wedderrichtelijk*) baik secara eksplisit maupun implisit ada dalam suatu Pasal. Adanya sifat melawan hukum yang eksplisit maupun implisit dalam suatu Pasal masih dalam perdebatan, tapi tidak dapat disanksikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau si terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian didepan pengadilan.¹⁷

Sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, misalnya pada Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua kaidah-kaidah sosial agama.

c. Tidak Ada Alasan Pembena

1. Daya Paksa *Absolute*

Sathocid Kartanegara mendefinisikan daya paksa *Absolute* sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* hlm 69

“Daya paksa *absolute* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain”¹⁸

Daya paksa (*overmacht*) , telah diatur oleh pembentuk undang-

undang di dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan suatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”

Teks asli Pasal tersebut yaitu:

“*Niet strafbaar is hij die een feit begat wartoc hij door overmacht is gedrongen*”

Daya paksa (*overmacht*), dapat terjadi pada peristiwa-peristiwa

berikut:

- a) Peristiwa-peristiwa dimana terdapat pemaksaan secara fisik;
- b) Peristiwa-peristiwa dimana terdapat pemaksaan secara psikis;
- c) Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut *Nothstand*, *Noodtoestand* atau sebagai *etot de necessite*, yaitu suatu keadaan dimana terdapat:
 - a. Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain.
 - b. Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum yang satu dengan kepentingan hukum.
 - c. Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain.

B. Pengertian Anak dan Hak Anak

1. Pengertian Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention On The Right Of The Child* tahun 1989. Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa

¹⁸ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 55

Mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak Atau *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice* (“*The Beijing Rule*”) Tahun 1985 Dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Atau *Universal Declaration Of Human Rights* Tahun 1948.

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21(dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Pada penetapan ketentuan hukum untuk meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang berbeda-beda. Batas usia anak yang layak dalam pengertian hukum nasional dan hukum internasional (Konvensi Hak Anak/CRC), telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifik hukum, seperti berikut ini:

1. Batas usia seseorang menurut ketentuan Hukum Perdata

Hukum Perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 ayat

(1) KUHPerdata sebagai berikut:¹⁹

¹⁹ M. Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, 2000, hal.24-25.

- a. Batas antara usia belum dewasa (*minderjarighead*) dengan telah dewasa (*meerderjarighead*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun ;
 - b. Dan seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.
2. Batas usia anak menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), Sebagai berikut:
- a. Pasal 7 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi seorang wanita, yaitu 16 (enam belas) tahun.
 - b. Pasal 47 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.
 - c. Pasal 50 ayat (1), menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.
3. Batas usia anak menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
4. Batas usia anak menurut ketentuan Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 mengatur bahwa seseorang yang umurnya belum 16 (enam belas tahun) masih dianggap

belum dewasa dan segala tuntutan atas perbuatannya harus diputus oleh hakim untuk memerintahkan supaya pelaku dikembalikan kepada orang tuanya.

Batas usia anak yang berkonflik dengan hukum memuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:

- a. Anak pelaku tindak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum) adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak korban tindak pidana (anak yang berhadapan dengan hukum) adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak saksi tindak pidana (anak yang berhadapan dengan hukum) adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dalam sendiri.
5. Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak (*converention on the rights of the child*) ,pada Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa sebagai berikut:

“Seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berusia di bawah 18(delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.”

Pengertian batas usia anak pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksud pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat bergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab terhadap anak dalam hal-hal berikut ini:

1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
4. Pengelompokan proses pemeliharaan
5. Pembinaan efektif.

Seorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia, yaitu nol (0) tahun, batas penuntutan 12 (dua belas) tahun sampai dengan batas 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dengan demikian batasan mengenai usia anak di dalam berbagai ketentuan hukum tersebut di atas telah sangat jelas diatur kapan seseorang itu dikategorikan sebagai anak, dari ketentuan batasan usia yang sangat

bervariatif tersebut,dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

- a. Seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;
- b. Masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya atau walinya selama kekuasaan itu tidak dicabut;
- c. Belum cakap dan belum dapat bertanggung jawab di dalam masyarakat.

2. Hak Anak

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:²¹

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar

²⁰ *Ibid.*, hal.26.

²¹ *Ibid.*,hal 45-47

menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.

3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar

pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.

10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 UU tersebut menentukan:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”²²

C. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Ruang lingkup pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) sangat luas, karena persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dibatasi oleh sekat-sekat suku, agama dan ras, termasuk sekat wilayah negara, sosial, politik,

²²*Ibid.*, hal.47

dan hukum karena Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia tanpa melihat adanya sekat atau perbedaan tersebut.

Universal Declaration of Human Right atau pernyataan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, dalam deklarasinya dikatakan bahwa Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ini sebagai suatu dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara. Tujuannya agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat senantiasa berusaha untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan dengan jalan mengambil tindakan progresif yang bersifat nasional dan internasional.

Indonesia merupakan negara yang menegakkan HAM bagi setiap warganya. Hak Asasi Manusia sendiri merupakan hak dasar yang dibawa sejak lahir yang berlaku universal pada semua manusia. Yang dimaksud dengan HAM sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yaitu “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Pendirian bangsa Indonesia mengenai HAM berlandaskan Sila II Pancasila : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang dijiwai dan dilandasi oleh sila-sila lainnya. Maksudnya adalah HAM itu harus:

- 1) Sesuai dengan kodrat manusia. Menurut kodratnya, manusia itu adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial.
- 2) HAM harus dihargai dan dijunjung tinggi secara adil. Maksudnya memperlakukan tiap manusia sesuai dengan martabat kemanusiaannya.
- 3) Tidak tanpa arti adanya istilah “dan beradab”. Maksudnya ialah: HAM yang diterima dan dijunjung tinggi itu tidak tanpa batas. Batasnya adalah:
 - a) Penggunaan HAM itu harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa (Sila I);
 - b) Harus meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa (Sila III)
 - c) Harus tetap dalam suasana dan iklim yang demokratis (Sila IV)
 - d) Harus menunjang kesejahteraan umum (Sila V)
 - e) HAM dapat dibatasi oleh tujuan-tujuan Negara, yaitu: untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dankeadilan sosial.²³

²³*Ibid.* hal.10

2. Perlindungan Ham Terhadap Anak

Anak merupakan salah satu pihak yang rentan mengalami objek pelanggaran Hak Asasi. Pengertian Kelompok Rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia merupakan hal yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Berbagai batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak.

Dari segi regulasi, peraturan terkait perlindungan terhadap hak asasi anak dimulai dengan *Convention on the Rights of the Child*/Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA). Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang

Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak) tanggal 25 Agustus 1990. Dalam *Convention on the Rights of the Child* terkandung 4 (empat) prinsip dasar yaitu:

1. Prinsip non-diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM;²⁴
2. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) artinya bahwa di dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama;²⁵
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival, and development*) artinya harus diakui bahwa hak hidup anak melekat pada diri setiap anak dan hak anak atas kelangsungan hidup serta perkembangannya juga harus dijamin;²⁶
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) artinya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.²⁷

Beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi anak. Hal ini dapat dilihat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana hak asasi anak mendapat tempat tersendiri dalam Undang-undang ini. Anak merupakan subjek hukum yang sangat rentan

²⁴ Pasal 2 : Konvensi Hak Anak

²⁵ Pasal 3 : Konvensi Hak Anak

²⁶ Pasal 6 : Konvensi Hak Anak

²⁷ Pasal 12 : Konvensi Hak Anak

dalam proses penegakan hukum khususnya dalam proses peradilan. Hak anak dalam proses peradilan menurut Undang-Undang antara lain yaitu:

1. Tidak dianiaya, disiksa, atau dihukum secara tidak manusiawi;
2. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
3. Tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
4. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjarakan secara melawan hukum, atau jika sebagai upaya yang terakhir (*measure of the last resort*);
5. Diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana;
6. Hak atas bantuan hukum, untuk membela diri dan memperoleh keadilan di Pengadilan Anak yang bebas dan tidak memihak.

D. Diversi

1. Pengertian Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan “*Diversi is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice sistem* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).²⁸

Pengertian diversi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

2. Tujuan Diversi

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih

²⁸ Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal *Equality*, Vol. 13. No.1 Februari 2008, hal 97.

terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :

- a) Untuk menghindari anak dari penahanan;
- b) Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c) Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d) Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e) Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- f) Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

1. Syarat Diversi

Diversi juga tidak serta merta diupayakan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi.

Syarat utama Diversi adalah *pertama* : korban dan/atau keluarga Anak korban menyetujui pelaksanaan diversi. *kedua* : Anak (pelaku) serta keluarganya bersedia melakukan Diversi. Akan tetapi tidak semua perkara wajib dilakukan Diversi, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mengatur hanya dilaksanakan dalam hal Anak melakukan tindak pidana yang :

- a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

- b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana; yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.

E. Balai Pemasyarakatan

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan." Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk wargabinaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

Menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk.

2. Tugas, Fungsi dan Kedudukan Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dari BAPAS salah satunya adalah membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang Anak dengan membuat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas/Case work).²⁹ Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok Balai Pemasyarakatan adalah:

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus

²⁹ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, 2004, *Analisa Situasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Unicef, Jakarta, Hal.8

mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Tugas-tugas tersebut merupakan suatu kegiatan pemberian bimbingan terhadap orang-orang dan anak-anak yang dikenai suatu sanksi. Bimbingan kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek pelaksanaan bimbingan kepada para pelanggar hukum.

Balai Pemasyarakatan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut mempunyai fungsi, antara lain:

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak maupun untuk pembinaan dalam Lapas (asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat);
- b. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
- c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- d. Mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan;
- f. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.

3. Esensi Pembinaan Terhadap Anak

a. Pengertian Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pembinaan berarti proses, cara, perbuatan membina, usaha, tindakan dan kegiatan yang diadakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan juga dapat berarti suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat menyebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diasumsikan bahwa pembinaan adalah suatu usaha kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih baik (sempurna) baik dengan melalui pemeliharaan dan bimbingan terhadap apa yang sudah ada (yang sudah dimiliki). Serta juga mendapatkan hal yang belum dimilikinya yaitu pengetahuan dan kecakapan yang baru.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa ‘Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga

Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS'. Jadi dalam uraian Pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas BAPAS adalah sebagai pembimbing pemasyarakatan bukan sebagai Pembina kemasyarakatan. Hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat yang menyatakan pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan. Klien Pemasyarakatan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan yang dibimbing oleh BAPAS.

b. Pembinaan Anak

Berdasarkan Pasal 42 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, klien anak merupakan Terpidana bersyarat, Narapidana, AnakPidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cutimenjelang bebas, Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok. Pembinaan klien anak adalah suatu pelaksanaan dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

Bimbingan klien pemasyarakatan pada hakekatnya adalah pembinaan klien di luar Lembaga sebagai salah satu sistem perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Untuk membimbing klien anak tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan di daerah Kota Makassar, tepatnya di Kepolisian Sektor Panakukang, Balai Pemasarakatan dan penelitian langsung kepada masyarakat di kota Makassar.

Dipilihnya lokasi penelitian di Polsek Panakukang karena di daerah Kecamatan Panakukang tingkat kriminalitasnya tinggi. Belum lagi pelaku tindak pidana yang terlapor di polsek panakukang rata-rata pelakunya adalah anak di bawah umur. Sedangkan lokasi penelitian selanjutnya yaitu bapas, dipilih karena bapas mempunyai peran pendampingan terhadap anak yang berhadap dengan hukum.

B. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari pihak yang berkompeten dilapangan berupa wawancara dengan pihak/pejabat setempat di lokasi penelitian.

- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, undang-undang dan data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data guna membahas masalah tersebut dilakukan dengan cara:

1) Studi Pustaka

Metode yang dilakukan dengan mempergunakan buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang erat kaitannya dengan topik penelitian untuk mendapatkan data sekunder.

2) Studi Lapangan

Penelitian lapangan penulis memperoleh data primer dengan menggunakan dua metode, yaitu :

- a) Metode Observasi yaitu penulis mendatangi langsung ke lokasi penelitian.
- b) Metode wawancara (*Interview*) sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.

D. Analisis Data

Dalam penulisan ini, data yang diperoleh baik data primer, maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan topik yang penulis kaji.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana oleh Anak ditinjau dari Sudut Pandang Ham

1. Latar Belakang Diversi

Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus berlangsung. Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak yang terlibat. Penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar 80% dari anak-anak yang diketahui polisi melakukan pelanggaran hukum hanya akan melakukannya satu kali itu saja, jadi penggunaan sumber-sumber sistem peradilan yang ‘menakutkan’ untuk menangani anak-anak ini sesungguhnya sangat tidak berdasar, kecuali benar-benar diperlukan.³⁰

Lembaga pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa,

³⁰ Santi kusumaningrum, *Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum.* (Dikembangkan dari Laporan yang Disusun oleh Chris Graveson) <http://santi.kusumaningrum-diversion-guidelines-adopted-from-chris-report.pdf>. Diakses tanggal 2 April 2017. Pukul 14:35 WITA

tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan Bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “*white collar crime*” lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat Negara, direksi bank, intelektual, profesional, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni lembaga pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.³¹

Spektrum penghuni lembaga pemasyarakatan yang sangat luas, baik dari kejahatan, latar belakang, profesionalisme, usia, dan lamanya hukuman, menyebabkan pengelolaan lembaga pemasyarakatan pun menjadi sangat kompleks dan memerlukan penyesuaian ataupun perubahan. Selain itu juga lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas dari semestinya yang mengakibatkan terjadinya penggabungan antara orang dewasa dan anak-anak dalam satu ruangan. Hal ini berpengaruh sangat besar kepada anak yang melakukan tindak pidana, baik secara fisik ataupun psikologis, jika dihukum dengan penjara.³²

Lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas

³¹ Rahardi Ramelan, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, dimuat di harian Kompas tanggal 19 Mei 2007. <http://leapidea.com/presentation?id=85> Diakses pada tanggal 2 April 2017, pukul 20:10 WITA.

³² *Ibid.*,

sosial. Maka tidaklah mengejutkan, Sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Yang memperhatikan, mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara.³³

Diversi sebagai bentuk pengalihan hukuman anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ditegaskan bahwa pemberian diversi dilakukan disemua tahap yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, wajib diupayakan diversi. UU ini pun menyadari bahwa diversi harus diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan melalui mekanisme harus dibuatkan berita acara diversi, dan diberikan kepada pengadilan negeri sebagai pertimbangan mengenai kasus dan koreksi terhadap pelaksanaan diversi. Sehingga antara instansi terjadi *check and balances* untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Diversi

Dasar hukum pembenaran dalam pelaksanaan diversi dalam menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum, baik secara nasional dan internasional :

³³ Steven Ellen dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice Sistem)* Di Indonesia UNICEF, Indonesia, 2003, hal.1.

a. Instrumen Peraturan Perundangan Nasional

Diversi sebenarnya bukan hal baru dilaksanakan dalam penegakan hukum Indonesia. Praktek penegakan hukum dilapangan, yang dilakukan selama ini secara tidak disadari telah menyentuh konsep diversifikasi tersebut. Misalnya penyelesaian masalah adat secara damai tanpa harus melibatkan aparat hukum, atau penyelesaian perkara di luar siding untuk kasus-kasus pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, polisi dengan wewenang diskresinya boleh menentukan apakah seseorang harus dibawah siding ke pengadilan atau cukup diselesaikan ditempat, pada kejaksaan juga dikenal istilah wewenang menyampingkan perkara oleh Jaksa Agung atas alasan demi kepentingan hukum, ini juga merupakan bagian dari versi. Namun secara disadari, diversifikasi merupakan hal baru dalam tataran perundang-undangan penegakan hukum di Indonesia. Atas mandate dari *Beijing rules*, Indonesia diminta untuk mengadopsi dan melaksanakan diversifikasi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini menandakan bahwa metode diversifikasi merupakan metode yang secara internasional sudah disepakati sebagai metode yang efektif dalam menangani permasalahan tindak pidana. Berikut beberapa peraturan nasional baik yang secara implisit ataupun secara eksplisit mengatur tentang diversifikasi dalam penanganan perkara tindak pidana anak.

1) Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Undang-undang ini ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan anak dan terpenuhinya kebutuhan pokok anak.³⁴ Dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai hak-hak anak, yakni .³⁵

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Dalam hal usaha untuk kesejahteraan anak tersebut maka yang dapat dilakukan adalah:³⁶

- a. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- b. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

³⁴ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak : Pasal 1 angka 2

³⁵ *Ibid.*, Pasal 2

³⁶ *Ibid.*, Paal 11

- c. Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar panti.
- d. Pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Dengan melihat kondisi tersebut dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum maka hukuman penjara bukanlah jalan yang terbaik bagi anak. Hal ini disebabkan yang diperlukan bagi seorang anak adalah pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini tidak mengatur secara khusus dan secara eksplisit tentang pelaksanaan metode diversi dalam menyelesaikan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Namun, jika diperhatikan secara seksama, sebenarnya undang-undang ini mengusung niat untuk menyelesaikan masalah anak dengan cara yang menjamin perlindungan anak. Pasal 3, jelas menyebutkan mengenai tujuan dari perlindungan anak, yaitu untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat terhindar dari kekerasan, diskriminasi, dengan harapan demi terwujudnya masa depan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Masalah perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi juga ditegaskan dalam Pasal 4 ketentuan mengenai hak-hak anak.

Pasal 16 mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tegas diatur bahwa penangkapan, penahanan, atau penjara dilakukan apabila sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dengan ketentuan ini, maka setiap aparat penegak hukum yang menangani masalah anak, maka harus menjadikan usaha penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan sebagai upaya terakhir, hal ini sesuai dengan konsep hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Maka, sebelum sampai kepada upaya terakhir tersebut, setiap penegak hukum harus memikirkan metode yang efektif dalam menangani permasalahan anak, dan dari titik inilah metode diversifikasi menjadi suatu kebutuhan untuk segera dilaksanakan. Berarti, undang-undang ini secara implisit mengamanatkan penegak hukum untuk segera melakukan diversifikasi sebelum mencapai upaya terakhir, mengusahakan anak tidak terlibat dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam undang-undang ini tidak menyebutkan ketentuan diversifikasi, sehingga aparat penegak hukum masih menjadikan penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan sebagai solusi utama dan pertama (*premium remedium*), sehingga membawa dampak negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

b. Instrumen Internasional

1) *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

Konvensi Hak-hak Anak, menegaskan bahwa : Negara-negara peserta harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan, dan lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak

yang diduga, disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana dan khususnya:³⁷

- a. Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia dibawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana.
- b. Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengaman hukum sepenuhnya dihormati.

2) *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Konvenan internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik ini disahkan pada tahun 1979, kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR. Dalam instrument hukum ini ada beberapa prinsip tentang penyelenggaraan yang dirumuskan antara lain setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi, tidak seorangpun boleh dikenakan penahanan dan penawanan secara gegabah, setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penawanan harus diperlakukan secara manusia dengan menghormati harkat yang melekat pada insan manusia.

³⁷ *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak). Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 november 1989. Pasal 40.

Terkait dengan hak anak dalam peradilan pidana anak ditentukan prinsip bahwa pelanggaran hukum yang diberikan perlakuan yang layak bagi usia dan status hukum mereka, serta perlunya diutamakan rehabilitasi.³⁸ Hal ini berarti bahwa peradilan yang menempatkan anak sebagai tersangka ataupun terdakwa harus dipisahkan agar anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak mendapat hukuman yang bersifat menyakiti tetapi hukuman yang bersifat *restorative* dan *rehabilitative*.

3) *The United Nations Standart Minimum Rules for Administration Of Juvenile Justice – The Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak – Peraturan Beijing)

Beijing Rules merupakan regulasi internasional yang memberikan mandat bagi setiap Negara peserta untuk merealisasikan perlindungan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Regulasi ini mengamanatkan kepada setiap Negara peserta untuk memberlakukan diversifikasi untuk menangani permasalahan anak. Pengaturan mengenai diversifikasi ditegaskan dalam butir 11 ayat (1),(2),(3) dan (4), yang berbunyi: ³⁹

³⁸ *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Resolusi Majelis Umum 2200 A(XXI) Tanggal 16 Desember 1979. Pasal 50.

³⁹ *The United Nations Standart Minimum Rules for Administration Of Juvenile Justice – The Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak – Peraturan Beijing), Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 Tanggal 29 November 1985, butir 11 ayat (1),(2),(3) dan (4),

1. Apabila perlu, pertimbangan harus diberikan kepada pejabat yang berwenang dalam menangani anak pelaku tindak pidana tanpa mengikuti proses peradilan;
2. Polisi, jaksa, atau lembaga lain yang menangani kasus anak-anak nakal harus diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut dengan kebijakan mereka tanpa melalui peradilan formal, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam tujuan sistem hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas dalam ketentuan lain;
3. Setiap diversi yang melibatkan penyerahan kepada masyarakat atau pelayanan lain yang dipandang perlu, membutuhkan persetujuan anak, atau orang tua, atau walinya. Keputusan untuk mengalihkan kasus harus tunduk pada peninjauan kembali pejabat yang berwenang pada prakteknya;
4. Untuk mempermudah disposisi kebijakan kasus-kasus anak, upaya-upaya harus dilakukan untuk mengadakan program masyarakat seperti pengawasan dan panduan secara temporer, restitusi dan kompensasi kepada korban.

Beijing Rules dalam bagian *comment* (penjelasan) memberikan keterangan tentang ketentuan diversi yaitu:

Praktek diversi atau pengalihan berguna untuk menghalangi pengaruh-pengaruh negatif dari proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan bagi anak (misalnya cacat karena pernyataan bersalah dan vonis hukuman). Dalam banyak perkara, non-intervensi akan

merupakan jawaban terbaik. Dengan demikian, pengalihan pada awal dan tanpa perujukan pada pelayanan-pelayanan alternatif (sosial) dapat merupakan jawaban terbaik. Terutama jika perkaranya merupakan pelanggaran hukum yang tidak bersifat serius dan dimana keluarga, sekolah atau lembaga-lembaga pengendalian sosial informal lainnya telah bereaksi, atau kemungkinan akan bereaksi, dalam cara yang memadai dan membangun.

4) *The United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya)

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa “Perenggutan Kemerdekaan” adalah segala bentuk penahanan atau hukuman penjara apapun atau penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan, dimana orang tersebut tidak diperkenankan pergi sesukannya, atas perintah suatu pihak kehakiman, administrative, atau pihak umum lainnya. Tujuan dari peraturan ini adalah menetapkan standar minimum bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya dalam segala bentuk, yang konsisten dengan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, dan bermaksud meniadakan pengaruh merugikan dari semua jenis penahanan, dan untuk membina reintegrasi dalam masyarakat. Dalam hal

anak yang ditangkap atau yang menunggu persidangan maka hal yang harus dilakukan adalah:⁴⁰

1. Tindakan penahanan harus dihindari;
2. Kalaupun terpaksa dilakukan, dibatasi untuk keadaan tertentu;
3. Harus diupayakan langkah-langkah alternatif;
4. Semua anak harus dianggap tidak bersalah;
5. Proses pengadilan yang harus cepat;
6. Penahanan harus dipisahkan dengan anak-anak yang dipidana;
7. Bantuan hukum untuk anak.

5) *The United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency – The Riyadh Guidelines* (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh)

Regulasi ini memang tidak secara eksplisit mengatur mengenai pelaksanaan diversi, namun saran yang diberikan melalui ketentuan ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diperlakukan demi penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam menangani masalahanak yang berhadapan dengan hukum, penekanan harus diberikan terhadap dan integrasi seluruh anak dan remaja, terutama melalui keluarga, masyarakat, kelompok-kelompok sebaya mereka, sekolah-sekolah, pelatihan kejuruan dan dunia kerja, serta melalui

⁴⁰ *The United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya). Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 45/133 Tanggal 14 November 1990.

organisasi-organisasi sukarela. Perkembangan pribadi anak-anak dan remaja yang sesuai agar diperhatikan serta dalam proses sosialisasi dan integrasi mereka agar diterima sebagai mitra penuh dan seimbang.⁴¹

Penempatan anak atau remaja dalam suatu institusi agar menjadi upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkatnya, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak atau remaja. Kriteria-kriteria dalam intervensi resmi mengenai hal ini agar secara tegas diatur dan terbatas kepada situasi-situasi, seperti:⁴²

1. Dalam hal anak atau remaja mengalami bahaya yang diakibatkan oleh orang tua atau walinya;
2. Dalam hal anak atau remaja telah mengalami kesewenang-wenangan seksual, fisik dan emosi yang dilakukan oleh orang tua atau walinya;
3. Dalam hal anak atau remaja terabaikan, disia-siakan atau dieksploitasi oleh orang tua atau walinya;
4. Dalam hal anak atau remaja yang terancam bahaya fisik atau moral sehubungan dengan perilaku orang tua atau walinya;
5. Dalam hal bahaya serius atau psikologis terhadap anak atau remaja itu sendiri serta pelayanan-pelayanan masyarakat di luar lingkungan tinggalnya, kecuali melalui institusionalisasi, tidak dapat mengatasi bahaya yang dimaksud.

⁴¹ *The United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency – The Riyadh Guidelines* (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh), disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.45/112 tanggal 14 Desember 1990. Butir 10.

⁴² *Ibid.*, Pasal 46

Regulasi ini juga menyatakan bahwa penempatan anak atau remaja dalam suatu institusi agar menjadi upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkatnya, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak atau remaja. Dalam rangka mencegah berlanjutnya memperlakukan, mengorbankan dan menghukum remaja, perundang-undangan agar diciptakan guna menjamin bahwa setiap perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran dan tidak dijatuhi hukuman apabila dilakukan oleh anak atau remaja.⁴³

3. Pelaksanaan Diversi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Penanganan perkara pidana anak di Indonesia, diperlukan aturan yang jelas dan tegas mengenai diversi dalam penanganan masalah kejahatan anak dari sistem peradilan pidana. Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 16 di UU SPPA. Bentuk pelaksanaan diversi yang diatur dalam ketentuan ini yaitu dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, dan dapat juga melibatkan tenaga kerja sosial dan/atau masyarakat.⁴⁴

Proses pelaksanaan diversi memegang prinsip keadilan restoratif dengan memperhatikan : kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggungjawab anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan

⁴³ *Ibid.*, Pasal 56

⁴⁴ Undang-Undang No.11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012, Pasal 8 ayat (1),(2).

ketertiban umum.⁴⁵ Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.⁴⁶ kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut, dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversi bisa dilaksanakan.

Penyidik, penuntut umum dan hakim ketika mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; kerugian yang ditimbulkan atas perilaku anak; bagaimana tingkat perhatian dan pendapat masyarakat atas kasus tersebut; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.⁴⁷ Tidak semua kasus anak dapat dilakukan diversi, karena pelaksanaan diversi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya.⁴⁸

Beberapa bentuk hasil kesepakatan dalam pelaksanaan diversi yaitu: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; pelayanan masyarakat.⁴⁹ Kemudian hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam suatu keputusan, dan berlaku pada sejak dicapai kesepakatan tersebut. Namun, agar keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum maka pembimbing kemasyarakatan meminta

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 8 ayat 3

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 7 ayat 1

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 9 ayat 1

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 9 ayat 2

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 10

penetapan dari ketua pengadilan negeri dengan cara menyampaikan berkas kesepakatan diversi ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Setelah penetapan disahkan oleh pengadilan, hasil penetapan tersebut diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang menangani perkara tersebut.⁵⁰

Proses pemeriksaan anak hanya dapat dilanjutkan ke proses peradilan pidana anak jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak.⁵¹ Tanggungjawab pengawasan atau monitoring hasil dan pelaksanaan diversi berada pada atasan langsung pejabat yang sedang memeriksa perkara anak, dan ini diwajibkan pada setiap tingkat pemeriksaan. Selain itu, peran pembimbing kemasyarakatan juga sebagai pengawasan dan pembimbing selama proses diversi berlangsung, jika diversi tidak dihasilkan maka pembimbing kemasyarakatan melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab untuk ditindaklanjuti.⁵²

4. Kriteria dan Syarat-syarat dilaksanakannya Diversi

Penerapan diversi dilakukan secara selektif setelah dengan berbagai pertimbangan. Dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan tersebut, kejahatan dapat ke dalam 3 (tiga) bagian kategori yaitu tingkat ringan, sedang dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sebisa mungkin diversi dilakukan. Untuk

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 12 ayat 4

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 12

⁵² *Ibid.*, Pasal 14

kejahatan/kenakalan sedang,terdapat faktor pertimbangan untuk dilakukan diversi. Untuk kejahatan berat diversi bukanlah pilihan.⁵³

Beberapa kejahatan yang tergolong ringan sebagai *petty crime*, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya tedapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi.⁵⁴

Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku tindak pidana berbeda-beda. Oleh karena itu, beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan untuk dapat dilakukan diversi sebagai berikut:⁵⁵

1. Sifat dan kondisi perbuatan. Pertimbangan pertama diversi adalah seriuritas, perbuatan, atau berat. Latar belakang dapat menjadi pertimbangan.
2. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan. Jika anak pernah melakukan pelanggaran hukum, diversi harus tetap menjadi pertimbangan. Jika anak sering melakukan pelanggaran hukum maka sulit dilakukan diversi. Namun perlu dilakukan langkah dan pemikiran matang demi kepentingan terbaik bagi anak.
3. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan agar diversi dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada persetujuan dengan korban.

⁵³ Setya Wahyudi, *Op.cit*, hal 61

⁵⁴ *Ibid.*, hal 61

⁵⁵ *Ibid.*, hal.61-62

Adapun syarat-syarat dilaksanakannya diversi yang mengacu pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat diselesaikan melalui upaya diversi. Dan untuk mengetahui dan memahaminya melalui berbagai syarat yang harus dipenuhi dalam mengambil langkah diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak. Demi tercapainya tujuan diversi, maka pemenuhan atas syarat-syarat tersebut tersebut merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan. Syarat-syarat bagi terlaksanannya diversi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mencakup hal berikut:

1. Usia pelaku harus benar-benar berkategori sebagai anak.
Keabsahan pelaku berkategori sebagai anak menjadi sesuatu hal penting yang harus dipenuhi. Hal tersebut mengingat bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah memberikan batasan tertentu tentang siapa yang tergolong sebagai anak, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 3.
2. Adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan ketersediannya untuk dilakukan upaya diversi.
Adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan hal penting dalam upaya diversi. Bahwa upaya diversi ini tidaklah hanya sekedar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 huruf b, salah satu tujuan diversi yaitu menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Lebih dari pada itu, upaya diversi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak pidana. Pada sisi yang lain, kesediaan pelaku untuk menyelesaikan masalahnya melalui upaya diversi memegang peranan penting. Upaya diversi tidak dapat dilaksanakan tanpa kesediaan pihak pelaku, meskipun pelaku mengakui perbuatannya.

3. Adanya persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana, Pasal 9 ayat 2.
Korban merupakan pihak yang dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagai pihak yang dirugikan, pada umumnya korban akan memiliki keinginan agar perilaku merugikan yang diperbuat anak untuk dipertanggungjawabkan melalui proses hukum formal. Keinginan pihak korban tersebut merupakan sesuatu hal yang wajar adanya dan secara normative keinginan pihak korban tersebut telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang keinginan korban untuk melakukan pembalasan dengan cara main hakim sendiri. Memperhatikan hal-hal tersebut maka adanya persetujuan dari pihak korban dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat penting. Dengan adanya persetujuan dari pihak korban maka diharapkan dapat mengakomodir keinginan korban dalam bentuk lain dan menghindarkan dari adanya upaya main hakim sendiri dari pihak korban.
4. Adanya dukungan masyarakat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak, Pasal 9 ayat 1 huruf d.
Penyelesaian masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak jangan hanya menitikberatkan pada hubungan antara pelaku dan korban saja, melainkan harus dilihat pula hubungannya dengan masyarakat. Masyarakat sebagai pihak yang mungkin saja terkena dampak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun sebagai pihak yang dapat dilibatkan dalam upaya memperbaiki perilaku anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses diversifikasi. Memperhatikan hal tersebut maka keberhasilan pencapaian tujuan diversifikasi sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dari masyarakat.
5. Pada Pasal 7 ayat 2 dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai syarat yang menghendaki masalah anak harus di diversifikasi yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh); Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversifikasi adalah:⁵⁶

⁵⁶ Marlina, *Op.cit*, hal.97-98

1. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa;
2. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan;
3. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan;
4. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversi semakin diperlukan;;
5. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak;
6. Persetujuan korban/keluarga;
7. Kesiediaan pelaku dan keluarganya;

8. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa.

5. Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak yang Berhadapan dengan Hukum

The Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) atau pernyataan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia yang diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 menyebutkan bahwa HAM adalah dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara. Sedangkan pengertian HAM menurut UU No.39 Tahun 1999 Pasal 1 berbunyi: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak yang terkandung dalam *Convention on the Rights of the Child* / Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA). Konvensi yang disetujui oleh Majelis Umum PBB dengan mengacu kepada empat prinsip dasar yaitu, prinsip non-diskriminasi, prinsip

kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Mengenai anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with law*), begitu KHA menyebutnya, di Indonesia telah disahkan sebuah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut disebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak nakal paling lama seperdua dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa, sehingga setiap anak yang terbukti melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhi hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun, karena ancaman hukuman pidana penjara yang diatur dalam KUHP maksimal 20 tahun. Alasan pembuat undang-undang membuat batas hukum pidana ini hanya sepuluh tahun, karena sebagai anak-anak mereka masih mempunyai masa depan dan usia yang panjang untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya.⁵⁷

Salah satu standar dalam diversi adalah *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*⁵⁸ (dikenal sebagai *Beijing Rules*). Article 5 Beijing Rules menyatakan “ *the juvenile justice sistem shall emphasize the well-being of the juvenile and shall*

⁵⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa, 2006, hal, 88-89

⁵⁸ Disahkan oleh Majelis Umum PBB Pada 29 November 1985. Standar minimum ini seringkali disebut sebagai Beijing rules untuk memeringati perumusannya yang sebagian besar dilakukan di Beijing, China.

ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence". Beijing Rules sendiri memberikan definisi diversi sebagai remaja/anak yakni anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing, dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. Pada intinya *Beijing Rules* memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan pengalihan pemeriksaan formal, yang disebut diversi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis di polsek Panakukang, kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut semuanya merupakan tindak pidana pencurian. Penanganan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) yang dilakukan dengan cara diversi dan diproses secara hukum formal terjadi peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Di tahun 2015, dari 45 kasus tindak pidana anak, 10 kasus berhasil diselesaikan dengan diversi, sedangkan pada Januari 2016 sampai dengan November 2016, dari 53 kasus, 19 kasus dapat terselesaikan dengan cara diversi. Dengan kata lain, penanganan kasus pidana anak melalui diversi meningkat dari 22% di tahun 2015 menjadi 35% di tahun 2016.

Hal ini didukung oleh pernyataan salah satu staf Humas Polsek Panakukang, Bapak Abdul (Polsek Panakukang, wawancara ***tanggal 6 April 2017***) :

“Dari beberapa kasus tindak pidana oleh anak yang kami tangani, terutama untuk kasus-kasus ringan seperti pencurian ringan, kami jarang melanjutkan ke proses hukum. Kami lebih berupaya agar terjadi proses mediasi dan kemudian melakukan pendekatan diversi agar anak yang menjadi pelaku tindak pencurian tersebut dapat dibimbing dengan lebih baik”.

Mengenai proses diversi yang dilakukan oleh pihak Polsek Panakukang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bapak Samsul (Staf Humas Polsek Panakukang, wawancara ***tanggal April 7 2017***) :

“Setelah menerima pelaporan dari masyarakat atau korban, maka kami segera melakukan penangkapan lalu tersangka diperiksa oleh penyidik. Penangkapan baru sah setelah dilengkapi oleh alat bukti. Setelah itu, dilakukan penahanan selama 7 hari. Di tingkat penyidikan, penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian dan bapas sebagai mediator akan mengupayakan diversi”

Dari hasil wawancara tersebut, maka prosedur pelaksanaan diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di polsek Panakukang dapat dijabarkan melalui beberapa poin penting, antara lain :

1. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terutama kasus pidana ringan akan diupayakan proses diversi dengan mediator penyidik kepolisian dan bapas.
2. Setelah kedua belah pihak (pelaku dan korban) setuju untuk dilakukannya diversi terhadap pelaku tindak pidana, bapas mempunyai tugas untuk melakukan penelitian masyarakat (LitMas).

3. Litmas dibuat oleh bapak atas hasil penelitian tentang anak sebagai pelaku tindak pidana dan hasil tersebut akan dikirimkan ke kepolisian.
4. Litmas diterima oleh kepolisian untuk diteruskan ke pengadilan sebagai penetapan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan dengan cara diversi jika diversi berhasil dilaksanakan.
5. Litmas akan dibuat sebagai penerusan kasus pidana ke pengadilan jika diversi gagal dilaksanakan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa penegak hukum telah memberikan upaya diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UU SPPA yang menyatakan bahwa penanganan ABH wajib diupayakan dengan cara diversi. Dengan diversi, maka tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk dalam sistem peradilan pidana. Alih-alih demikian, diupayakan suatu penyelesaian konflik melalui forum yang disebut sebagai mediasi yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*)

Beberapa manfaat dari pelaksanaan program diversi antara lain :

1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi sedini mungkin.
2. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut kepada keluarga, korban dan masyarakat.

3. Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasihat hidup sehari-hari.
4. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab.
5. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan mengamati akibat dari efek kasus tersebut.
6. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas cacat kejahatan

Dari semua hal penjabaran mengenai manfaat diversi tersebut, tentunya hal ini memberikan kesempatan buat anak untuk mendapatkan kembali hak untuk melanjutkan hidupnya, sesuai dengan tujuan dari hak asasi manusia, jika diversi berhasil.

Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan diversi adalah dari pihak korban yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku karena adanya kerugian yang dialami pihak korban disamping itu pihak korban ingin memberikan efek jera kepada pelaku dan adanya paradigma negatif dari pihak korban tentang proses peradilan pelaku. Hal ini diungkapkan oleh Samsul (Staf Humas Polsek Panakukang, wawancara ***tanggal April 7 2017***) bahwa:

“Ketika mereka didamaikan, masyarakat beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku sehingga pelaku tidak diproses. Padahal kami melakukan upaya damai untuk kepentingan terbaik bagi

anak. Penyidik harus hati-hati dalam proses mediasi karena pihak korban beranggapan bahwa aparat penegak hukum memihak ke pelaku”

Paradigma negatif seperti inilah yang menjadi salah satu kendala kepolisian dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Paradigma negatif di masyarakat yang menyatakan bahwa setiap tindakan kejahatan yang dilakukan harus ada balasannya. Hal ini dapat menjadi pokok perhatian bahwa pihak penyidik, penegak hukum sebaiknya dapat menanamkan dan memberikan wawasan baru kepada masyarakat bahwa proses diversi bertujuan untuk mencapai solusi musyawarah yang baik untuk semua pihak, baik pihak pelaku ataupun korban.

B. Peran Balai Pemasyarakatan dalam Penerapan Diversi pada Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri. Sistem Peradilan pidana dalam kerangka sistem merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksaan perkara di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling dukung mendukung secara sinergis hingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai.

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Dimana Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan bagian dari sistem Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbing dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak.

1. Kedudukan Hukum Bapas Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kedudukan hukum dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam peraturan perundangan Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.⁵⁹ Adapun Klien Pemasyarakatan dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.⁶⁰

Nama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebelumnya adalah Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No.M.01.PR.07.03 Tahun 1997 namanya diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

2. Peran Bapas Dalam Implementasi Diversi Anak

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi anak berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.⁶¹ Anak yang berhadapan

⁵⁹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.12 Tahun 1995

⁶⁰ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.12 Tahun 1995

⁶¹ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁶² Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶³

Anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun yang menjadi korban tindak pidana diberikan pendekatan restoratif. Pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.⁶⁴ Keadilan restorative merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menetralkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁶⁵

⁶² Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

⁶³ Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

⁶⁴ Surat Keputusan Bersama tahun 2009 tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum: Pasal 1 ayat 5

⁶⁵ Penjelasan I. Umum Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut hasil penelitian penulis, Perkara dimulai dengan adanya laporan, aduan dan kemungkinan penyidik mengetahui sendiri. Bersama-sama dengan Balai pemasyarakatan (Bapas), pihak korban dan pihak orang tua pelaku, penyidik mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Tindak lanjut dari penyidikan ini untuk menentukan apakah anak yang berhadapan dengan hukum tersebut perlu diteruskan kepada penuntutan atau dilakukan diversi.

Berdasarkan data ABH yang didapatkan dari Bapas Makassar, terlihat bahwa proses diversi yang dilakukan Bapas sudah berjalan baik, dengan tidak adanya anak yang dipidanakan.

Tabel 1

Data ABH Berdasarkan Status Klien di Bapas Makassar

Tahun	Anak Kembali ke Orang Tua / Wali	Pidana Bersyarat Anak	Lepas Bersyarat Anak
2015	6	-	4
2016	11	-	8
Total	17	-	12

Sumber : BAPAS Tahun 2017

Sedangkan mengenai jenis ABH di Bapas Makassar dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2

Data Jenis dan Jumlah ABH di BAPAS Makassar

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah ABH Tahun 2016
1	Pencurian	60
2	Perbuatan Cabul	15
3	Kekerasan / Ancaman Kekerasan	10
4	Pengursakan	9
5	Pengeroyokan	6
6	Perbuatan Cabul	5
7	Lain-Lain	3
Jumlah		98

Sumber : BAPAS Tahun 2017

Dari data tersebut terlihat bahwa tindak pidana anak yang mayoritas dilakukan adalah tindak pencurian (60 kasus dari 98 kasus yang terjadi di BAPAS).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis di bapas Makassar, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum terkait diversi dan keadilan restoratif melalui proses penanganan anak

yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pra adjudikasi, adjudikasi, postajudikasi yaitu:

a) Peran Bapas yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) pada tahap Pra adjudikasi terkait upaya upaya yang harus dilakukan dalam penanganan anak. Penanganan pada tahap pra adjudikasi dilakukan sejak anak ditangani oleh penyidik pada kantor kepolisian pada saat pemeriksaan , penyidikan yang kemudian dilimpahkan ke penuntut umum pada kejaksaan negeri hingga pelimpahan ke pengadilan negeri. Sebelum hakim melakukan pemeriksaan secara formal di ruang persidangan maka masih termasuk dalam tahapan praajudikasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya akan kita sebut UU SPPA, bahwa PK Bapas memiliki tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.⁶⁶

Penyidik sejak melakukan pemeriksaan terhadap anak sudah melibatkan PK. PK memiliki kewajiban dalam waktu 3 x 24 membuat laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Penyidik bersama dengan PK, pekerja sosial, korban, pelaku, keluarga dan pihak-pihak terkait memiliki kewajiban melakukan upaya Diversi. Upaya diversi yang dilakukan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan pada UU SPPA PK juga memiliki kewajiban untuk menentukan program pelayanan dan

⁶⁶Pasal 64 Undang-Undang No.11 Tahun 2012

perawatan selama anak ditempatkan di LPAS dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut.

Adapun upaya Diversi dan Keadilan Restoratif pada tahap Pra Ajudikasi adalah sebagai berikut :

1. PK membuat laporan Litmas.
2. Mendampingi anak dan memastikan pemenuhan hak-hak anak terkait penahanan apakah dilakukan atau tidak dan bagaimana upaya non penahanan dilakukan.
3. Memastikan jika ditahan anak ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa dan hak-haknya tetap terpenuhi seperti makan, pakaian, dan pendampingan dari penasehat hukum.
4. Memastikan anak mendapat perlakuan yang baik selama masa penahanan mendapat kunjungan dari keluarga.
5. Mendapatkan akses pendidikan.
6. Menganalisa kasus dan kemungkinan penyelesaiannya.

Jika berdasarkan syarat dan ketentuan dapat dilakukan upaya diversi maka PK:

1. Merekomendasikan upaya diversi dengan pertimbangan dan analisa yang mendalam. Pertimbangan upaya diversi terus dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan. Misalnya pada saat tingkat penyidikan upaya diversi gagal, maka PK wajib memberikan pertimbangan upaya diversi pada tingkat penuntutan dengan menyampaikan laporan hasil upaya diversi sebelumnya. Sehingga kegagalan yang dilakukan tidak

terulang dan dapat dicarikan alternatif pilihan lainnya. Hal ini juga dilakukan pada saat pemeriksaan pada pengadilan. Sesuai dengan Pasal 52 UU SPPA bahwa hakim juga wajib melakukan upaya diversi sebelum anak diajukan ke persidangan.

2. Mencarikan beberapa alternatif bentuk saran penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif seperti anak dikembalikan ke orang tua, diserahkan ke lembaga mengikut kerja sosial atau alternatif lainnya sebagaimana diatur dalam UU SPPA bentuk-bentuk tindakan yang dapat diberikan kepada anak.
3. Selanjutnya bersama penyidik mempersiapkan dan membantu memfasilitasi upaya pertemuan musyawarah atau yang lebih dikenal Pada saat kesepakatan diversi telah dicapai pada saat tahap praajudikasi dan telah mendapat penetapan dari pengadilan, maka tugas PK adalah melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak. Pendampingan dan pembimbingan yang diberikan dalam bentuk:
 1. Memastikan anak dapat diterima keluarga, masyarakat atau dimana anak ditempatkan.
 2. Memastikan anak mendapatkan pemenuhan hak-haknya,
 3. Membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak.
 4. Memberikan bimbingan kepribadian dan ketrampilan atau memfasilitasi akses layanan tersebut.

5. Pengawasan yang dilakukan PK terkait bagaimana anak dan keluarga dapat memahami dan melaksanakan hasil kesepakatan yang telah dicapai pada saat musyawarah.
6. PK memberikan laporan hasil perkembangan pembimbingan dan pengawasannya kepada pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan.

Setelah masa pembimbingan berakhir, PK membuat laporan pengakhiran pembimbingan namun jika pada saat proses pembimbingan terjadi pelanggaran dari hasil kesepakatan atau anak melakukan tindak pidana lagi, maka PK melaporkan hal tersebut dan kasus dapat dilanjutkan kembali.

- b) Peran pembimbing kemasyarakatan pada tahap adjudikasi saat persidangan yaitu mendampingi anak dengan memastikan apakah proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:
 1. Hakim yang menangani adalah hakim anak dan dilakukan tunggal kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang ancamannya diatas 7 tahun.
 2. PK juga memastikan ketentuan proses persidangan seperti tempat sidang, waktu, petugas dan APH tidak memakai seragam sebagaimana diatur pada Pasal 22 dan juga memastikan hak-hak anak seperti didampingi oleh pengacara.
 3. Pada saat persidangan, PK menyampaikan dan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan.
 4. Mendampingi saksi yang tidak bias hadir melalui perekam elektronik.

5. Menyampaikan kepada hakim terkait hal-hak yang menguntungkan bagi anak.

Inti keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Hal ini tentunya berlaku dalam setiap upaya penyelesaian perkara anak baik melalui diversi ataupun persidangan.

Saat tahap persidangan (ajudikasi), peran hakim lebih dominan karena selaku pemimpin jalannya persidangan. Keberhasilan proses sidang anak terletak pada hakim yang memimpin jalannya sidang. Peran PK disini adalah memberikan rekomendasi kepada hakim terkait bagaimana putusan yang sebaiknya diberikan kepada anak. Rekomendasi yang PK berikan harus akurat, tepat dan realitas dengan mempertimbangkan kepentingan anak, korban, keluarga dan masyarakat yang tentunya pemberian putusan tindakan adalah skala prioritas. Rekomendasi putusan yang berikan kepada anak juga harus melihat efek pembelajaran bukan yang bersifat penjeraan.

Peran PK dalam persidangan selain memberikan rekomendasi terhadap putusan hakim juga yang paling penting adalah bagaimana melakukan pendampingan sesungguhnya kepada anak, yaitu:

a) Mendampingi klien dalam proses diversi di tingkat pengadilan.

b) Memberikan penguatan mental klien saat akan menghadapi persidangan.

c) Memfasilitasi dalam pemenuhan hak klien: misalnya penasehat hukum

Selanjutnya proses penanganan anak di bapas pada tahap post adjudikasi. Post adjudikasi dapat diartikan sebagai pasca putusan pengadilan. Peran PK pada tahap ini meliputi bagaimana penanganan anak yang diputus oleh pengadilan dijatuhi pidana maupun tindakan.

Dalam UU SPPA jenis pidana diatur pada Pasal 71 yaitu:

1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. pemenuhan kewajiban adat.

3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Adapun jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak diatur pada Pasal 82 yaitu:

- 1) pengembalian kepada orang tua/Wali;
- 2) penyerahan kepada seseorang;
- 3) perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) perawatan di LPKS;
- 5) kewajiban mengikuti formal dan / atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- 6) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- 7) perbaikan akibat tindak pidana.

Litmas dilakukan oleh PK untuk menentukan program pelayanan dan pembinaan serta program yang akan diberikan kepada anak. Pendampingan, pembimbingan dan pengawasan kepada anak dilakukan oleh PK dengan melibatkan pekerja sosial, pemuka masyarakatan maupun lembaga-lembaga layanan lainnya. Peran-peran tersebut akan lebih jelas kita bahas pada sub pokok bahasan selanjutnya.

Adapun upaya Keadilan Restoratif pada tahap Post Ajudikasi adalah Mengawasi anak terkait upaya pemulihan hubungan dengan keluarga, korban dan masyarakat pada saat melaksanakan putusan hakim berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua. Mengupayakan pemulihan hubungan dengan keluarga, korban dan masyarakatan pada saat anak menjalani pidana penjara hingga menjelang reintegrasi. Membuat litmas untuk program-program reintegrasi.

Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan hasil putusan pengadilan adalah : Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dikembalikan ke orang tua, diberikan putusan pidana bersyarat atau pengawasan dan yang sedang menjalani integrasi (Pembebasan bersyarat ,cuti bersyarat dll) dicatat dalam registrasi Bapas sebagai klien pemasyarakatan. PK berkewajiban melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan kepada klien:

1. Pendampingan dapat diartikan sebagai peran pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi klien dalam menghadapi permasalahan; klien yang dimaksud disini adalah klien pemasyarakatan serta anak berkonflik dengan hukum.
2. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
3. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan anak dalam menjalankan putusan maupun ketentuan dalam proses pembimbingan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dari penelitian maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan, sebagai berikut :

1. Penerapan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dianggap sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang melindungi hak anak. Diversi memberikan kesempatan buat anak untuk mendapatkan kembali haknya untuk melanjutkan hidupnya. Berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.
2. Balai Pemasyarakatan berperan untuk melakukan bimbingan dan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses Peradilan Anak, salah satu bentuknya dalam hal diversi. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa balai pemasyarakatan telah memenuhi perannya sebagai pembimbing dan pendamping anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses penanganan anak yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pra ajudikasi, ajudikasi, post ajudikasi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan dalam skripsi ini adalah:

1. Sosialisasi mengenai diversi ini harus lebih giat dilakukan baik bagi aparat kepolisian, Lembaga-Lembaga terkait, dan juga masyarakat baik dari tingkat pusat sampai kepada jajaran yang paling bawah;
2. Pemerintah harus memaksimalkan fungsi-fungsi lembaga-lembaga sosial yang berhubungan dengan pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan juga memperkuat posisi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) pada setiap tingkat penyidikan, sehingga hasil penelitiannya tidak hanya bersifat rekomendasi;
3. Sebaiknya Balai Pemasyarakatan melakukan sosialisasi mengenai fungsinya sebagai pendamping, pembimbing dan pengawas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Sebaiknya masyarakat ikut berperan dalam pendampingan serta pengawasan agar anak tersebut tidak melakukan pengulangan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa : Bandung

Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Bagian Pidana I*. Rajawali Pers:
Jakarta

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renggang Education:
Yogyakarta

Maidin Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama:Bandung

Marlina. 2008. *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak
Pidana Dalam System Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Equality

M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas.1995. *Aspek Hukum Perlindungan
Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Citra Aditya Bakti:Jakarta.

M. Hassan Wadong. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*.
Grasindo:Jakarta

Kusno Adi. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan
Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press : Malang

Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika:
Jakarta

P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra
Aditya Bakti: Bandung

R.Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea: Bogor

Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing: Yogyakarta.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. P.T. Rineka Cipta: Jakarta

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto : Semarang

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo: Jakarta

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Umm Press: Malang

Wirjono Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*. Freka Aditama: Bandung

PERATURAN-PERATURAN

Convention on the rights of the child (Konvensi Hak-Hak Anak), Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989.

International Covenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Resolusi Majelis Umum 2200 A(XXI) Tanggal 16 Desember 1979.

The United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency – The Riyadh Guidelines (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh), disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.45/112 tanggal 14 Desember 1990.

The United Nations Standart Minimum Rules for Administration Of Juvenile Justice – The Beijing Rules (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak – Peraturan Beijing), Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 Tanggal 29 November 1985

The United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya). Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 45/133 Tanggal 14 November 1990.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Keputusan Bersama : Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, Tahun 2009.

Sumber Lain

Purnianti , Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, 2004, *Analisa Situassistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Unicef, Jakarta,

Rahardi Ramelan, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, dimuat di harian kompas tanggal 19 mei 2007.
<http://leapidea.com/presentation?id=85> Diakses pada tanggal 2 April 2017, pukul 20:10 WITA.

Santi kusumaningrum, *Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum.*(Dikembangkan dari Laporan yang Disusun oleh Chris Graveson) http://santi_kusumaningrum-diversion-guidelines-adopted-from-chris-report.pdf. Diakses tanggal 2 April 2017. Pukul 14:35 WITA

Steven Ellen dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice Sistem)* Di Indonesia UNICEF, indonesia, 2003, hal.1.